

POLICY BRIEF

OPTIMALISASI PROGRAM BANTUAN PERIKANAN TANGKAP DAN BUDI DAYA DI KEPULAUAN SELAYAR

Policy Brief ini ditulis oleh
Lisna Liana



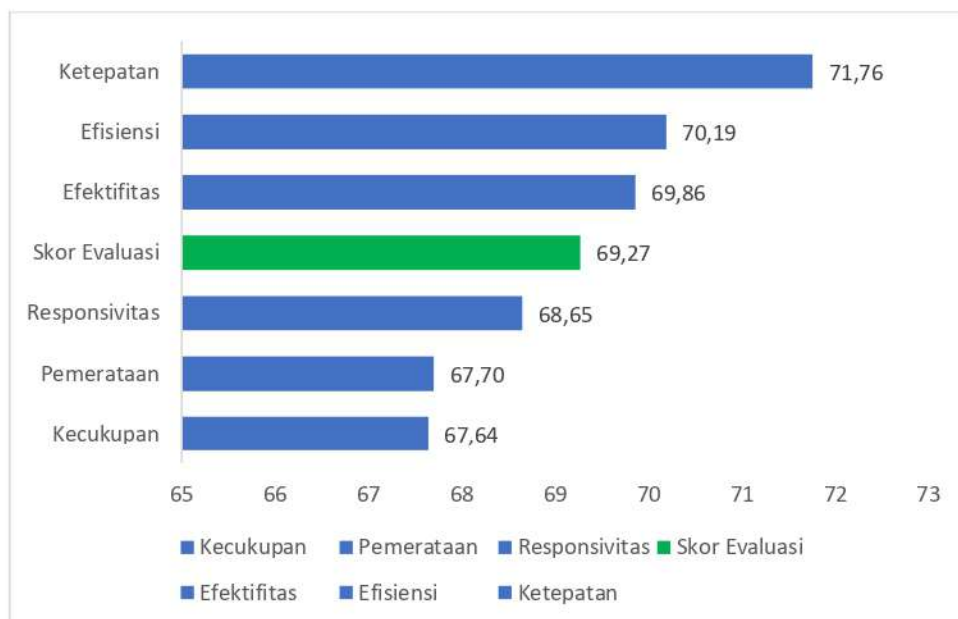
EXECUTIVE SUMMARY

Evaluasi program bantuan perikanan tangkap dan budi daya di Kepulauan Selayar mengungkap ketidaksesuaian bantuan dengan kebutuhan nelayan, ketidakmerataan distribusi dan pemanfaatan bantuan, serta minimnya sosialisasi yang efektif sebagai akar masalah belum optimalnya program. Masalah ini penting diselesaikan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, produktivitas sektor perikanan, partisipasi masyarakat, menghemat anggaran, dan mencapai tujuan pembangunan sektor perikanan. Solusinya adalah menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan riil melalui kajian partisipatif, mekanisme distribusi dan pemanfaatan bantuan yang transparan dan akuntabel, serta peningkatan sosialisasi yang efektif melalui strategi komunikasi, pelatihan penyuluh/ petugas, dan pendirian pusat informasi. Rekomendasi ditujukan kepada Dinas Perikanan Kepulauan Selayar untuk ditindaklanjuti sebagai agenda kebijakan jangka pendek dan menengah.

Pendahuluan

Sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya merupakan sektor strategis dalam pengembangan potensi sumber daya bahari di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagai upaya untuk mendukung pengembangan sektor ini, pada tahun 2021, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan telah memberikan bantuan perikanan tangkap dan perikanan budidaya kepada masyarakat. Namun, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahun 2023, ditemukan adanya indikasi bahwa program tersebut belum optimal.

Grafik 1. Skor Evaluasi beserta Indikatornya



Sumber : Bappelitbangda Kepulauan Selayar, 2023

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan enam indikator yang dikembangkan oleh Dunn yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, efisiensi, dan ketepatan (Dunn, 2013). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat tiga indikator yang skornya berada di bawah skor evaluasi, yakni indikator kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Rendahnya skor pada ketiga indikator tersebut mengindikasikan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program, seperti ketidaksesuaian bantuan dengan kebutuhan riil nelayan dan pembudidaya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, tidak meratanya distribusi dan pemanfaatan bantuan di antara anggota kelompok nelayan dan pembudidaya, serta kurangnya sosialisasi yang efektif dan spesifik mengenai program bantuan.

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan, seperti produktivitas dan hasil tangkapan/ panen sektor perikanan

stagnan, tidak meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya secara signifikan, rendahnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan, pemborosan anggaran dan sumber daya, serta tujuan pembangunan sektor perikanan yang tidak tercapai secara maksimal.

Deskripsi Masalah

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat tiga permasalahan utama program bantuan perikanan tangkap dan budi daya di Kepulauan Selayar.

1. Ketidaksesuaian Bantuan dengan Kebutuhan Nelayan dan Pembudidaya

Permasalahan utama dalam program bantuan perikanan adalah ketidaksesuaian antara bantuan yang diberikan dengan kebutuhan nelayan dan pembudidaya, mencakup aspek kuantitas, kualitas, dan jenis bantuan. Dari segi kuantitas, nelayan dan pembudidaya menginginkan peningkatan volume bantuan seperti jaring tangkap, bibit rumput laut, bibit udang, dan bibit ikan agar. Selain itu, mereka menyarankan anggaran untuk kapal berukuran 5 GT sebaiknya dibagi menjadi kapal-kapal yang lebih kecil sehingga lebih banyak kelompok yang menerima bantuan. Dari segi kualitas, bantuan yang diberikan dinilai perlu diperbaiki, seperti memperpanjang ukuran jaring tangkap, atau jaring diberikan dalam bentuk bahan baku agar dapat dirakit sendiri sesuai kebutuhan. Mesin bantuan juga perlu memiliki daya yang lebih besar sesuai dengan ukuran perahu yang besar, beberapa nelayan bahkan mengganti mesin bantuan dengan mesin pribadi yang lebih besar. Terkait jenis bantuan, nelayan mengusulkan agar bantuan diberikan dalam bentuk paket komprehensif, seperti perahu yang disertai dengan mesin.

Permasalahan ini diakui oleh pejabat struktural dan fungsional Dinas Perikanan, yang mengakui bahwa bantuan yang diberikan seringkali tidak sesuai dengan daftar kebutuhan yang diminta dan jumlah bantuan yang terbatas menimbulkan keluhan dari penerima. Hal ini sejalan dengan penelitian di Jawa Barat yang menemukan ketidaksesuaian bantuan dengan kebutuhan nelayan sebagai faktor utama kegagalan program (Susanto, dkk, 2019). Bantuan yang tidak sesuai dengan jenis, kualitas, dan kuantitas yang dibutuhkan nelayan mengakibatkan rendahnya efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

2. Ketidakmerataan dalam Distribusi dan Pemanfaatan Bantuan

Permasalahan lain yang ditemukan dalam pelaksanaan program bantuan perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah ketidakmerataan dalam pendistribusian dan pemanfaatan bantuan di antara anggota kelompok nelayan dan pembudidaya. Sejumlah nelayan dan pembudidaya menyatakan bahwa bantuan hanya diterima dan dimanfaatkan oleh sebagian kecil anggota kelompok, khususnya ketua kelompok, sementara anggota lainnya tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Ditemukan pula kasus dimana terjadi kesenjangan komunikasi yang cukup besar antara ketua dan anggota kelompok, bahkan ada ketua dan anggota kelompok yang tidak mengenal satu sama lain. Adapun pemanfaatan bantuan yang diterima juga bervariasi, ada yang digunakan secara kolektif dengan menyesuaikan ketersediaan waktu anggota, namun ada pula yang dimanfaatkan secara individu dengan sistem bergantian sesuai jadwal yang disepakati. Namun, tidak sedikit nelayan dan pembudidaya yang menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak dapat memanfaatkan bantuan karena dimonopoli oleh ketua kelompok. Permasalahan distribusi bantuan yang tidak merata ini sejalan dengan penelitian di Lampung yang menemukan bahwa hal tersebut menjadi salah satu faktor utama ketidakefektifan program bantuan perikanan, dimana distribusi yang tidak adil dan tidak transparan memicu konflik dan perpecahan dalam kelompok sehingga pemanfaatan bantuan menjadi tidak optimal ((Kurniawati, dkk, 2018).

3. Kurangnya Sosialisasi yang Efektif dan Spesifik Mengenai Bantuan

Permasalahan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program bantuan perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah minimnya sosialisasi yang efektif dan spesifik mengenai program tersebut. Meskipun nelayan dan pembudidaya dapat memperoleh informasi dengan mendatangi kantor Dinas Perikanan atau melalui penyuluh perikanan, namun seringkali informasi yang diberikan tidak lengkap. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi mereka untuk memahami mekanisme dan persyaratan penerima bantuan secara komprehensif. Bahkan ketika ada kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan tanggapan atau keluhan, tidak selalu ada jaminan bahwa masukan tersebut akan ditindaklanjuti dengan perubahan kebijakan yang nyata. Dinas Perikanan memang telah berupaya memberikan penjelasan dan sosialisasi kepada nelayan, namun upaya tersebut belum secara khusus ditargetkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program bantuan itu sendiri. Akibatnya, banyak nelayan dan pembudidaya yang merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai

atau tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait bantuan yang mereka terima. Padahal, menurut penelitian, keberhasilan suatu program bantuan tidak hanya bergantung pada kesesuaian bantuan dengan kebutuhan, tetapi juga pada tingkat pemahaman masyarakat sasaran terhadap tujuan, mekanisme, dan persyaratan program tersebut. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang baik dapat menyebabkan rendahnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan (Susanto, dkk, 2019).

Alternatif Solusi

Untuk mengoptimalkan program bantuan perikanan tangkap dan perikanan budi daya di Kepulauan Selayar, ditawarkan beberapa alternatif solusi sebagai berikut:

1. Penyesuaian Bantuan dengan Kebutuhan Nelayan dan Pembudidaya

Untuk meningkatkan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan nelayan dan pembudidaya, langkah-langkah berikut dapat diimplementasikan. Pertama, perlu dilakukan kajian dan analisis kebutuhan yang komprehensif dengan melibatkan partisipasi aktif dari nelayan dan pembudidaya melalui survei, wawancara, atau *focus group discussion*. Hal ini bertujuan untuk memahami secara tepat kebutuhan mereka di lapangan sehingga bantuan yang diberikan dapat lebih sesuai dan relevan. Selanjutnya, meningkatkan fleksibilitas dalam pilihan bantuan juga menjadi kunci, seperti memberikan opsi kepada penerima bantuan untuk memilih jenis bantuan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, diharapkan bantuan yang diberikan dapat lebih responsif terhadap kondisi dan kebutuhan riil para nelayan dan pembudidaya, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mendukung pengembangan sektor perikanan.

2. Pemerataan Distribusi dan Pemanfaatan Bantuan

Untuk meningkatkan efektivitas distribusi dan pemanfaatan bantuan perikanan, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, diperlukan penetapan mekanisme distribusi yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh anggota kelompok nelayan dan pembudidaya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan didistribusikan secara adil dan merata sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota. Selanjutnya, perlu ditingkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan di lapangan melalui pemantauan secara berkala guna memastikan bahwa bantuan dimanfaatkan secara efisien dan sesuai dengan tujuan

program. Selain itu, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kelompok nelayan dalam hal manajemen dan pemanfaatan bantuan secara optimal dan berkelanjutan akan membantu meningkatkan kapasitas mereka dalam memanfaatkan bantuan dengan baik. Terakhir, untuk memastikan partisipasi aktif seluruh anggota kelompok, perlu didorong adanya rapat-rapat rutin yang melibatkan semua anggota kelompok dalam proses penerimaan bantuan dan pengambilan keputusan terkait pemanfaatan bantuan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan distribusi bantuan perikanan dapat lebih merata dan pemanfaatannya dapat dioptimalkan secara maksimal oleh seluruh anggota kelompok.

3. Peningkatan Sosialisasi dan Responsivitas Program Bantuan

Peningkatan sosialisasi dan responsivitas program bantuan perikanan dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif dan terarah melalui pemanfaatan media untuk menyebarkan informasi tentang bantuan, seperti brosur, pamflet, poster, media sosial, dan situs web resmi Dinas Perikanan. Selanjutnya, penting untuk menyelenggarakan pelatihan atau *workshop* bagi penyuluh perikanan dan staf Dinas Perikanan guna meningkatkan keterampilan dalam menyampaikan informasi secara jelas dan persuasif kepada masyarakat. Implementasikan program penyuluh perikanan keliling yang secara rutin mengunjungi desa-desa nelayan untuk memberikan informasi, menerima masukan, dan menjawab pertanyaan terkait program bantuan. Terakhir, pendirian pusat informasi atau *hotline* yang dapat diakses oleh nelayan dan pembudidaya akan memberikan kemudahan bagi mereka untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan masukan, atau mengadukan keluhan terkait program bantuan, sehingga meningkatkan responsivitas dan kualitas layanan yang disediakan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap program bantuan perikanan dapat ditingkatkan secara signifikan.

Rekomendasi

Dari tiga alternatif solusi yang disampaikan, penulis merekomendasikan ketiga alternatif untuk ditindaklanjuti Dinas Perikanan Kepulauan Selayar sebagai agenda kebijakan jangka pendek dan menengah. Penyesuaian bantuan dengan kebutuhan nelayan dan pembudidaya dapat dilakukan pada tahap perencanaan program melalui kajian kebutuhan

yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sasaran. Hal ini dapat segera dilaksanakan pada tahun anggaran mendatang sebagai agenda kebijakan jangka pendek.

Pemerataan distribusi dan pemanfaatan bantuan merupakan agenda kebijakan jangka menengah yang perlu dilakukan secara berkelanjutan selama program bantuan berjalan. Upaya ini meliputi penetapan mekanisme distribusi yang transparan dan akuntabel, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan bantuan, pelatihan dan pendampingan kepada kelompok nelayan, serta mendorong partisipasi aktif melalui rapat-rapat rutin.

Peningkatan sosialisasi dan responsivitas program bantuan juga dapat menjadi agenda kebijakan jangka pendek yang dapat segera dilaksanakan melalui pengembangan strategi komunikasi yang efektif, pelatihan bagi penyuluh perikanan dan petugas Dinas Perikanan, mengoptimalkan peran penyuluh melalui program penyuluh perikanan keliling, serta pendirian pusat informasi.

Daftar Pustaka

- Bappelitbangda Kepulauan Selayar. (2023). Laporan Evaluasi Program Bantuan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Tahun 2023. Benteng: Bappelitbangda Kepulauan Selayar.
- Dunn, W. N. (2013). *Public Policy Analysis*. New York: Routledge.
- Kurniawati, R. D., Daud, M., & Asmi, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Program Bantuan Perikanan di Kabupaten Pesisir Barat Lampung. *Jurnal Ilmiah Akuakultur*, 13(1), 1-10.
- Susanto, A., Wijaya, H., & Sari, M. (2019). Keberhasilan Program Bantuan Perikanan: Studi Kasus di Indonesia. *Journal of Fisheries Development*, 14(2), 134-150.
- Susanto, D., Rahayu, S. A., & Hakim, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Bantuan Perikanan di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 14(1), 1-10.